

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Implementasi Program GAYATRI sebagai Upaya Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program GAYATRI di Kecamatan Ngambon secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan mampu mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis peternakan ayam petelur. Pelaksanaan program telah didukung oleh komunikasi yang relatif efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen para pelaksana, serta struktur birokrasi yang telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah pendamping lapangan, belum optimalnya intensitas pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta adanya faktor eksternal seperti tingginya harga pakan, penyakit ayam, dan fluktuasi harga telur yang memengaruhi keberlanjutan usaha peternakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penyempurnaan agar pelaksanaan Program GAYATRI dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pada masing-masing indikator implementasi kebijakan George C. Edward III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator komunikasi, implementasi Program GAYATRI di Kecamatan Ngambon telah berjalan dengan baik. Proses penyampaian informasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping lapangan, hingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, monitoring lapangan, serta media komunikasi berupa grup *WhatsApp*. Selain itu, informasi yang disampaikan telah relatif jelas dan konsisten sehingga tujuan program, mekanisme pelaksanaan, serta hak dan kewajiban penerima manfaat dapat dipahami oleh para pelaksana program. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa KPM yang mengharapkan intensitas komunikasi dan pendampingan secara tatap muka lebih sering, khususnya setelah bantuan disalurkan.
2. Berdasarkan indikator sumber daya, implementasi Program GAYATRI di Kecamatan Ngambon didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta kewenangan pelaksana yang secara umum telah memadai. Dukungan tersebut memungkinkan program GAYATRI dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Namun demikian, jumlah pendamping lapangan yang masih terbatas menyebabkan pendampingan belum dapat menjangkau seluruh KPM secara optimal. Selain itu, terdapat faktor eksternal berupa tingginya harga pakan, penyakit

ayam, dan fluktuasi harga telur yang turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.

3. Berdasarkan indikator disposisi, implementasi Program GAYATRI menunjukkan adanya komitmen, sikap, dan dukungan yang baik dari seluruh pelaksana program. Pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pendamping lapangan menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangannya masing-masing. Di sisi lain, KPM juga memiliki antusiasme untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun demikian, motivasi dan komitmen penerima manfaat perlu terus dipertahankan melalui pendampingan, pembinaan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar keberlanjutan pelaksanaan program dapat terjaga.
4. Berdasarkan indikator struktur birokrasi, implementasi Program GAYATRI telah didukung oleh pembagian tugas dan wewenang yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang sistematis, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta koordinasi antarinstansi yang berjalan cukup efektif. Pembagian kewenangan antar pelaksana telah tersusun secara berjenjang mulai dari pemerintah kabupaten hingga pendamping lapangan sehingga memudahkan koordinasi dan penyelesaian permasalahan di lapangan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pemahaman mengenai SOP secara merata di tingkat pelaksana serta penguatan monitoring dan pendampingan lapangan agar

implementasi program GAYATRI dapat berlangsung lebih efektif, konsisten, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi langsung kepada KPM, khususnya pada tahap pasca penyaluran bantuan. Penyampaian informasi tidak hanya melalui media digital, tetapi juga melalui kunjungan lapangan secara berkala agar seluruh penerima manfaat memperoleh informasi yang sama dan lebih mudah berkonsultasi mengenai kendala yang dihadapi.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pendamping Lapangan, perlu meningkatkan kualitas pendampingan kepada KPM melalui pembinaan teknis, monitoring secara berkala, serta penguatan kapasitas pendamping agar proses pendampingan dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara optimal.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu memperkuat dukungan sumber daya, terutama melalui penambahan jumlah pendamping lapangan serta pengembangan program pendukung seperti bantuan akses pakan, layanan kesehatan ternak, dan penguatan pemasaran hasil produksi telur. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan usaha peternakan yang dijalankan oleh KPM.

4. Bagi seluruh pelaksana Program GAYATRI, perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan Program GAYATRI dapat berlangsung lebih efektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai Program GAYATRI dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, misalnya pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta mengkaji dampak program terhadap peningkatan pendapatan, tingkat kesejahteraan, dan keberlanjutan usaha peternakan masyarakat dalam jangka panjang. Penelitian juga dapat diperluas pada kecamatan lain sehingga diperoleh gambaran implementasi Program GAYATRI secara lebih komprehensif di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arsyad, L., *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2016).
- Chambers, R., *Rural Development: Putting the Last First* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Kuncoro, M., *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010).
- Kuncoro, M., *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2013).
- Mardikanto, T. dan Soebiato, P., *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Moleong, L. J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).
- Sen, A., *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999).
- Sidiq, U. dan Choiri, M. M., *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
- Soekanto, S., *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Soemardjan, S., *Kemiskinan Struktural* (Jakarta: Rajawali, 1984).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suharsimi, A., *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Suharto, E., *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suharto, E., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- Sumodiningrat, G., *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan* (Jakarta: Impac, 1999).
- Sunggono, B., *Metodologi Penyusunan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- UNDP, *Human Development Report* (New York: UNDP, 2020).

Jurnal-Jurnal :

- Addawiyah, Febriani, dan Fadillah, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1 (2025): 44.
- Adi, F., “Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Pembangunan Sosial”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 1 (2019): 57.
- Anas, F., Zulkhah, S., dan Sholikin, A., “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan”, *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 2 (2024): 249.
- Ardian, M. dan Purba, A. M., “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan dalam Perspektif Ekonomi Politik”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 10, No. 2 (2021): 543.
- Ardiyanto, S. Y., “Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan,” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 6 No. 2 (2020): 118.
- Hardiyansyah, R. dan Amin, M., “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon”, *Journal Education and Government Wiyata*, Vol. 3, No. 1 (2025): 150.
- Hermawan, R. A. dan Lutfi, A., “Factors Affecting the Accuracy of Performance Indicators Deviation Page III DIPA in Level 1 Work Units at the Ministry of Foreign Affairs”, *Eduvest – Journal of Universal Studies*, Vol. 4, No. 4 (2024): 1993.
- Hernawan, D. dan Pratidina, G., “Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 6 No. 2 (2015): 165.
- Hidayat, M. T., Nursahidin, dan Wulandari, A., “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan”, *Reformasi: Jurnal Ilmiah Administrasi*, Vol. 5, No. 1 (2024): 15.
- Indrajanus, A., Yuska, S., “Admission-Orientation Model at Purwokerto Class IIA Correctional Facility”, *JOURNAL OF MANAGEMENT, Correctional Management*, Vol. 18, No. 1 (2025): 373-384.
- Kadji, F. M. A., “Implementasi Kebijakan Kewaspadaan Dini di Perbatasan Negara RI-RDTL”, *Jurnal Administrasi Publik* (2022): 4.
- Kurhayadi, “Public Policy Implementation: A Theoretical Review”, *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 4 No. 2 (2022): 124.

- Maldun, S., "Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan", *Jurnal Administrasita*, Vol. 3 No. 1 (2014): 16.
- Mansur, J., "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2 (2020): 213.
- Mertina, S., Susanti, A., Alamsyah, M. N., dan Irfan, M., "Implementation of protection policy sustainable food agricultural land (LP2B) in Balinggi District Parigi Maoutong regency", *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, Vol. 06 No. 01 (2025): 730-739.
- M., Husni Farhani., Caesar, M. R., Abdillah, F., Setyawati, I. E., dan Sapardin, C., "Implementation of the Climate-Concerned Village Policy in Mekarmulya Village, Talegong District, Garut Regency", *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 23 No. 3 (2025): 1069-1076.
- Rakhmat dan Fakih, F., "Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Vol. 1 No. 2 (2019): 33.
- Safaruddin, Fatmawati, Burhanuddin, dan Parawu, H. E., "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar", *Journal of Public Policy and Management*, Vol. 1, No. 1 (2019): 22.
- Sari, D. N. F., Wahyuli, Y. H., dan Anggleni, A., "Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal STIA Bengkulu*, Vol. 9, No. 1 (2023): 67.
- Sari, R. P. dan Rahayu, A. Y. S., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik", *Jurnal Perspektif*, Vol. 10 No. 1 (2021): 230.
- Siregar, N., "Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator", *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3 (2022): 745.
- Sumarsono, C. W., Muchsin, S., dan Sunariyanto, "Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa", *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2 (2022): 152.
- Wahyuni, S., "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah", *Jurnal Governance*, Vol. 5 No. 2 (2021): 103.

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Website :

Badan Pusat Statistik, “Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan”, <https://www.bps.go.id>, diakses tanggal 16 Mei 2026.

Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, “Persentase Penduduk Miskin Bojonegoro Tahun 2025”, <https://baghumas.bojonegorokab.go.id/berita/baca/845>, Diakses tanggal 13 Februari 2026 pukul 15:52 WIB.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, “Program GAYATRI Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat”, <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/baca/2360>, Diakses tanggal 13 Februari 2026 pukul 14:24 WIB.

iNews Bojonegoro, “Terus Diperluas, Program Gayatri Jangkau 2.600 Keluarga di Bojonegoro”, <https://bojonegoro.inews.id/read/646530/terus-diperluas-program-gayatri-jangkau-2600-keluarga-di-bojonegoro-didanai-dari-add-dan-csr>, Diakses tanggal 13 Februari 2026 pukul 15:06 WIB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Stunting dan Permasalahan Gizi di Indonesia”, <https://kemkes.go.id>, diakses tanggal 16 Mei 2026.

Milman Yusdi, “Metodologi Penelitian BAB III”, <http://milmanyusdi.blogspot.com/2019/11/metodologi-penelitian-bab-iii.html?m=1>, Diakses tanggal 16 Februari 2026 pukul 15:50 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, “Program GAYATRI sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, <https://bojonegorokab.go.id>, diakses tanggal 16 Mei 2026.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, “Tahun 2024 Jumlah Penduduk Miskin Bojonegoro Menurun 5.920 Jiwa”, <https://bojonegorokab.go.id/berita/7994/tahun-2024-jumlah-penduduk-miskin-bojonegoro-menurun-5920-jiwa>, Diakses tanggal 13 Februari 2026 pukul 15:40 WIB.

World Bank, “Poverty Overview”, <https://www.worldbank.org>, diakses tanggal 16 Mei 2026.